

S
336. 2014
Eka
e
2014

27412/27994

**EVALUASI MEKANISME SISTEM PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
(PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG)**



SKRIPSI OLEH :
EKA PUTRI SUGMA BANGSA
01101003008
AKUNTANSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
EVALUASI MEKANISME SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) SEBELUM DAN SESUDAH PERALIHAN DARI
PAJAK PUSAT KE PAJAK DAERAH
(PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG)

Disusun oleh:

Nama : Eka Putri Sugma Bangsa
NIM : 01101003008
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 26 Agustus 2014

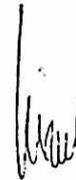
Ketua :



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak. CA
NIP 19650816 199512 1 001

Tanggal : 15 Agustus 2014

Anggota :



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.
NIP 19730317 199703 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**EVALUASI MEKANISME SISTEM PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
(PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG)**

Disusun Oleh :

Nama : Eka Putri Sugma Bangsa

NIM : 01101003008

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 11 September 2014 dan memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, September 2014

Ketua



Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA
NIP. 196508161995121001

Anggota



Arista Hakiki, S.E, M. Acc, Ak, CA
NIP. 197303171997031002

Anggota



Emylia Yuniartie, S.E, M.Si, Ak, CA
NIP. 197106021995032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA
NIP. 19650816 199512 1 001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Putri Sugma Bangsa

Nim : 01101003008

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

“Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”

Pembimbing :

Ketua : Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA

Anggota : Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak, CA

Tanggal Ujian : 11 September 2014

Adalah benar hasil karya saya di bawah bimbingan tim pembimbing. Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebut sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi, termasuk pembatalan gelar sarjana saya.

Pembuat Pernyataan,

  Eka Putri Sugma Bangsa
NIM 01101003008

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Hasbunallah wa Ni'mal Wakil"

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." (QS. Ali Imran 3: 137)

"Ni'mal Maula wa Ni'man Nashir"

"Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong." (QS. Al-Anfal 8:40)

"The struggle you're in today is developing the strength you need for tomorrow"

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku yang selalu mendoakanku
- Adik-adikku dan keluarga yang selalu menyemangati
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini mengambil judul “Evaluasi Mekanisme Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Bab VI Analisis dan Pembahasan dan Bab V Penutup.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata 1 (S-1) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme sistem pemungutan PBB P2 dan evaluasinya dilihat dari jumlah wajib pajak dan penerimaan yang dihasilkan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di Kota Palembang telah berjalan dengan baik dan efektif dilihat dari peningkatan target dan realisasi penerimaan PBB P2 Tahun 2012-2013 yang dihasilkan sesuai dengan peningkatan jumlah wajib pajak serta didukung kesigapan dan kesiapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pelayanan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan menjadi bahan masukan akademisi bagi penelitian berikutnya. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril dan materiil dalam proses penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa S.E,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
3. Bapak Ahmad Subeki S.E, M.M, Ak, CA, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan Ketua Pembimbing Skripsi
4. Bapak Mukhtaruddin, S.E, M.Si, Ak, CA, Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
5. Bapak Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak, CA, Anggota Pembimbing Skripsi
6. Ibu Emylia Yuniartie. S.E, M.Si, Ak, CA, Penguji Skripsi
7. Bapak Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak, CA Pembimbing Akademik
8. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
9. Orang Tuaku, saudaraku, seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, doa dan bantuan serta perhatian yang sangat besar.

10. Ibu Elly Dalti S.H, M.Si, Kasi Penilaian dan Pendapatan PBB
Dispenda Kota Palembang.
11. Emi dan Mbak Nora, Pegawai Dispenda Kota Palembang yang telah
memberikan data pendukung untuk penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2010 Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya Indralaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu
per satu.
13. Andini, Cicik, Abay, Zakir, Akbar, teman seminar proposal, teman
ujian komprehensif dan seluruh teman baik yang tidak bisa disebutkan
satu per satu. Terimakasih banyak atas dukungan dan waktu yang telah
kalian berikan untuk penulis.
14. Teman-teman kelas A, Handri, nopik, mei, dian, dydy , terimakasih
banyak untuk kebersamaan selama ini.
15. Teman-teman Beasiswa Bidik Misi Fakultas Ekonomi Jurusan
Akuntansi 2010.
16. Staf dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Indralaya
17. Semua pihak yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini yang
tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Terima kasih untuk segala keindahan dan kenangan tak tergantikan yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan memberikan berkah kepada kita semua. Amiiin Yaa Rabbal Allamiin.

Penulis

Eka Putri Sugma Bangsa

ABSTRAK

EVALUASI MEKANISME SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG)

Oleh :

Eka Putri Sugma Bangsa

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan mengevaluasi pengalihan PBB P2 sebelum dan sesudah peralihan dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dilihat dari jumlah penerimaan sesuai dengan jumlah wajib pajak. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melalui tiga prosedur yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 PBB P2 telah dilimpahkan wewenang ke Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya menentukan dan mencatat mulai dari pendataan, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan PBB P2 menjadi pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme sistem pemungutan PBB P2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah berjalan dengan baik dan efektif begitu juga kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB P2 sesuai dengan meningkatnya jumlah penerimaan dari tahun 2012-2013.

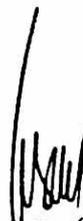
Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, mekanisme, evaluasi, pengalihan

Ketua



Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA
NIP. 19650816 199512 1 001

Anggota



Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak, CA
NIP. 19730317 199703 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA
NIP. 19650816 199512 1 001

ABSTRACT

THE EVALUATION OF COLLECTING SYSTEM ON LAND AND BUILDING TAX (LOCAL REVENUE OFFICES PALEMBANG)

By :

Eka Putri Sugma Bangsa., Amad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA., Arista Hakiki, S.E,

M.Acc, Ak, CA

The purpose of this study was to determine the mechanism of tax collection system Land and Building Rural and Urban (PBB P2) and evaluate the transfer of PBB P2 before and after the transition from the Tax Center to the Local Tax on Local Revenue Office of Palembang be seen from the number of admissions according to the number of taxpayers. Analysis of the data using descriptive qualitative method through three procedures which are data reduction, data presentation and draw conclusions. As the implementation of Law No. 28 of 2009 PBB P2 has been delegated the authority to Local Government to fully determine and record from the beginning of data collection, the establishment, administration, collection and service of the PBB P2 to be a local tax in order to improve the Local original income. The results show that the mechanism of collecting system on land and building tax (PBB P2) in Local Revenue Offices Palembang has been going well and effectively as well as awareness of the taxpayer to pay PBB P2 on time as the increasing amount of revenue from 2012-2013.

Keywords: land and building tax, mechanisms, evaluation, transition

Ketua



Amad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA
NIP. 19650816 199512 1 001

Anggota



Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak, CA
NIP. 19730317 199703 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA
NIP. 19650816 199512 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Eka Putri Sugma Bangsa
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/13 September 1992
Alamat : Jl. Jend. Bambang Utoyo Lr. Bugis RT. 13 RW.03
No. 15 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II
Palembang 30116
Agama : Islam
Gol. Darah : A
Berat/Tinggi Badan : 52 kg/157 cm
Kebangsaan : Indonesia
No. Handphone/E-mail : 0896 5043 0110 / eka_sugma@yahoo.com

Pendidikan :

1998-2004 : SD Negeri 88 Palembang
2004-2007 : SMP Negeri 8 Palembang
2007-2010 : SMK Negeri 1 Palembang
2010-2014 : Mahasiswa Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi Jurusan
Akuntansi

Pendidikan Non Formal :

2010-2012 : LBPP LIA Palembang

Organisasi :

2010-2011 : Anggota Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) Universitas
Sriwijaya
Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas
Sriwijaya

Palembang, September 2014

Eka Putri Sugma Bangsa



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
SURAT PERNYATAAN	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4.2 Data dan Metode Pengumpulan.....	8
1.4.3 Teknik Analisis Data.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak.....	12
2.2 Fungsi Pajak.....	13
2.3 Pengklasifikasian Pajak.....	14
2.4 Pengertian Pajak Daerah.....	17
2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.6 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.....	19
2.6.1 Pengertian PBB P2.....	19
2.6.2 Objek Pajak PBB P2.....	21
2.6.3 Subjek Pajak PBB P2.....	22
2.6.4 Masa Pajak, Saat dan Tempat Pajak PBB P2.....	23
2.7 Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG	
3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	25
3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	25
3.2.1 Visi.....	25

3.2.2	Misi.....	25
3.3	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.....	26
3.4	Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah	28
3.5	Ketentuan Umum dan Pembentukan Dispenda Kota Palembang.....	29
3.5.1	Ketentuan Umum.....	29
3.5.2	Pembentukan	30
3.6	Struktur Organisasi	31
3.6.1	Tugas dan Fungsi Jabatan.....	32
3.7	Hubungan Kerja Organisasi Dispenda Kota Palembang.....	38
3.8	Data Penerimaan PBB	38
3.8.1	Data Penerimaan PBB di Kanwil Sumsel Babel DJP Sebelum Peralihan.....	38
3.8.2	Data Penerimaan PBB di Dispenda Kota Palembang Sesudah Peralihan	39

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1	Mekanisme Pemungutan PBB.....	40
4.2	Mekanisme Penetapan PBB Sebelum Peralihan di Kanwil DJP Kota Palembang.....	42
4.2.1	Mekanisme Pendataan PBB Sebelum Peralihan di Kanwil DJP Kota Palembang.....	43
4.2.2	Mekanisme Penetapan PBB Sebelum Peralihan PBB di Kanwil DJP Kota Palembang.....	44
4.2.3	Mekanisme Pengadministrasian PBB Sebelum Peralihan di Kanwil DJP Kota Palembang.....	49
4.2.4	Mekanisme Pemungutan/Penagihan PBB Sebelum Peralihan di Kanwil DJP Kota Palembang.....	50
4.2.5	Dasar Perhitungan PBB Sebelum Peralihan di Kanwil DJP Kota Palembang.....	53
4.2.6	Sanksi PBB Sebelum Peralihan di Kanwil DJP Kota Palembang	54
4.2.7	Bagi Hasil Pusat dan Daerah Sebelum Peralihan di Kanwil DJP Kota Palembang.....	56
4.3	Mekanisme Penetapan PBB P2 Sesudah Peralihan di Dispenda Kota Palembang	57
4.3.1	Mekanisme Pendataan PBB Sesudah Peralihan di Dispenda Kota Palembang	57
4.3.2	Mekanisme Penetapan PBB Sesudah Peralihan di Dispenda Kota Palembang	58
4.3.3	Mekanisme Pengadministrasian PBB Sesudah Peralihan di Dispenda Kota Palembang	60
4.3.4	Mekanisme Pemungutan/penagihan PBB Sesudah Peralihan di Dispenda Kota Palembang	61
4.3.5	Dasar Perhitungan PBB Sesudah Peralihan di Dispenda Kota Palembang	62

4.3.6	Sanksi PBB Sesudah Peralihan di Dispenda Kota Palembang	62
4.3.7	Bagi Hasil PBB Sesudah Peralihan di Dispenda Kota Palembang	63
4.4	Evaluasi Mekanisme Pendataan PBB Sebelum dan Sesudah Peralihan	64
4.4.1	Evaluasi Mekanisme Penetapan PBB Sebelum dan Sesudah Peralihan.....	66
4.4.2	Evaluasi Mekanisme Pengadministrasian PBB Sebelum dan Sesudah Peralihan.....	67
4.4.3	Evaluasi Mekanisme Penagihan PBB Sebelum dan Sesudah Peralihan.....	68
4.4.4	Evaluasi Penerimaan PBB Sebelum dan Sesudah Peralihan.....	69
BAB IV PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	78
5.3	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penambahan Jenis Pajak Baru Kabupaten/Kota	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Data Penerimaan PBB di Kanwil Dirjen Pajak Sumsel-Babel.....	38
Tabel 3.2 Data Penerimaan PBB di Dispenda Kota Palembang.....	39
Tabel 4.1 Perbandingan Mekanisme Pemungutan PBB	73

DAFTAR GAMBAR

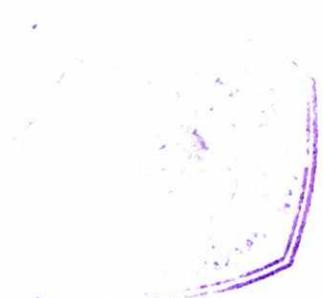
	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	31
Gambar 4.1 Skema Skema Mekanisme Pemungutan PBB.....	40
Gambar 4.2 Skema Skema Pengenaan PBB Sebelum Peralihan.....	44
Gambar 4.3 Skema Skema Alur Penetapan PBB.....	50
Gambar 4.4 Skema Skema Alur Pembayaran PBB	52
Gambar 4.5 Skema Penagihan PBB.....	55
Gambar 4.6 Perbandingan Penerimaan PBB P2 Sebelum dan Sesudah Peralihan.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2009	83
Lampiran 2 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2010	84
Lampiran 3 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2011	85
Lampiran 4 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2012	86
Lampiran 5 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2013	87

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Seiring dengan euforia otonomi daerah melalui pola desentralisasi fiskal maka mulai tanggal 1 januari 2010, pajak bumi dan bangunan atau yang dikenal dengan PBB akan resmi sepenuhnya menjadi pajak daerah (*local tax*) menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). PBB dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas objek pajak berupa bumi dan atau bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. (Dirjen Pajak, 2012).

Objek Pajak PBB P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3), sedangkan subjek pajak atau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan (UU No. 28 Tahun 2009). Hal ini berarti pada pengenaan PBB P2, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama.

Selama ini pelaksanaan pemungutan dan pengalokasian PBB dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur (*reguleren*) agar

pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri, namun demikian seluruh penerimaan pajaknya diberikan kembali ke Pemerintah Pusat melalui pola bagi hasil. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan PBB, sehingga wajib pajak akan melaporkan sendiri pembayaran PBB langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Nilai lebih dari pengalihan PBB ini diharapkan akan membawa iklim demokrasi yang lebih baik karena berakar langsung pada kondisi konkrit di daerah yang bersangkutan dan diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya (Fitria, 2012). Hal ini dinilai akan dapat terwujud bila pengelolaan PBB P2 diserahkan kepada masing-masing pemegang otonomi. Yang dimaksud dengan pengalihan wewenang sebenarnya adalah pengalihan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang, pelaksanaan kegiatan penagihan pajak terhadap wajib pajak, serta pengawasan penyeterannya yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) adalah (*money follows functions*), yaitu fungsi pelayanan publik didaerahkan tentunya masih dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah dengan kata lain pengalihan PBB ke daerah ini bertujuan untuk meningkatkan (*local taxing power*) di Kabupaten/Kota.

Kota Palembang adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang pemerintah daerahnya senantiasa meningkatkan potensi daerahnya

dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan baik oleh Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah pusat. Kota Palembang sendiri telah melakukan pengalihan PBB pada tahun 2012 kemudian Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2013. Sebagai wujud upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yaitu dengan melaksanakan amanat UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pengalihan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Sebelum dikelola Dispenda, di Kota Palembang tercatat ada 243.000 wajib pajak pada tahun 2009, 273.000 wajib pajak pada tahun 2010 dan 258.000 wajib pajak pada tahun 2011. Setelah dikelola Dispenda Kota Palembang pada tahun 2012 mengalami kenaikan mencapai 285.000 wajib pajak.

**Tabel 1.2 Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota
pada UU No.34/2000 dengan UU No. 28/2009**

UU 34/2000	UU 28/2009
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 6. Pajak Parkir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

<p>7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C</p>	<p>7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Bawah Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. PBB Pedesaan & Perkotaan (baru) 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru)</p>
---	---

Sumber : Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

Mengingat dominannya peran pajak dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama bagi sumber penerimaan Negara, maka diperlukan suatu mekanisme atau prosedural yang tepat dalam mengelola semua pajak ini, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Agar pengelolaan PBB ini dapat berjalan baik dan terarah. Saat ini sudah 2 tahun sejak dialihkannya PBB P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tentunya pengalihan ini akan mempunyai dampak yang luas terutama pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersangkutan, dalam hal ini kota Palembang. Namun apakah pengalihan ini sudah tepat dan berjalan lebih baik dibandingkan saat dikelola oleh Pemerintah Pusat, seyogyanya perlu untuk dievaluasi lebih lanjut.

Pelimpahan pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah menurut pasal 182 ayat 1 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014. Pada prinsipnya secara administrasi terjadi perpindahan pencatatan hasil pemungutan PBB, jika sebelumnya penerimaan PBB tercatat pada keuangan negara (APBN) dalam

penerimaan perpajakan, kemudian setelah mekanisme peralihan berjalan akan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan pengelolaan PBB P2 pada akhir tahun 2013, daerah tersebut akan berpotensi kehilangan salah satu sumber PAD karena pada saat ini pemerintah pusat sudah tidak boleh melakukan pemungutan terhadap PBB.

Dengan latar belakang inilah penulis merasa tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai **“Evaluasi Mekanisme Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum peralihan di Kantor Wilayah DJP Kota Palembang?
2. Bagaimana mekanisme sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesudah peralihan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang?
3. Apakah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah telah berjalan dengan baik dan efektif?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum dan sesudah peralihan dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui apakah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah ini berjalan lebih baik dan efektif dibandingkan saat dikelola oleh Pemerintah Pusat.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pengalihan dan pemungutan PBB P2.
2. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan mendongkrak penerimaan PBB P2 guna meningkatkan PAD.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai mekanisme sistem pemungutan PBB P2 setelah dilalihkan menjadi pajak daerah.

4. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mekanisme sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum dan sesudah peralihan dari pajak pusat ke pajak daerah serta evaluasinya dilihat dari banyaknya jumlah wajib pajak dan penerimaan yang dihasilkan.

1.4.2. Data dan Metode Pengumpulan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer atau data pokok ini adalah data yang diperoleh penulis dengan terjun langsung ke objek penelitian dalam hal ini melakukan wawancara dan juga melakukan pengambilan data-data yang berhubungan dengan penulisan penelitian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), adapun data yang digunakan adalah Data internal yakni dokumen-dokumen yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara, yaitu penulis melakukan serangkaian tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak organisasi atau petugas yang bersangkutan yang dianggap perlu mengenai mekanisme sistem perpajakan PBB sebelum dan setelah peralihan dan wawancara dilakukan dengan Ka. Penerimaan PBB di Kantor Dispenda Palembang yakni Ibu Elly Dalti, S.H, M.H.

Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pencatatan atau pengkopian terhadap dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang dibutuhkan penulis seperti SOP Dispenda Kota Palembang 2013 dan Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang.
- b. Studi Kepustakaan (Literatur), untuk memperoleh landasan teori mengenai mekanisme sistem perpajakan PBB melalui buku-buku, makalah-makalah, seminar, jurnal-jurnal, catatan kuliah, artikel majalah yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan hasil penelitian ini.

1.4.3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu metode yang menyajikan dan menganalisis data (studi kasus) sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan benar mengenai objek yang diteliti dengan membandingkan antara mekanisme pemungutan PBB sebelum dan sesudah peralihan di Kota Palembang.

Teknik analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan. Setelah data yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan diperoleh selanjutnya analisis data tersebut. Kemudian mengevaluasi dan membandingkan data yang diperoleh antara mekanisme yang berjalan saat PBB masih dikendalikan oleh pemerintah pusat dengan mekanisme yang berjalan saat PBB setelah dikendalikan oleh pemerintah daerah. Setelah menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan, dari pengevaluasian dan perbandingan tersebut baru dapat dilihat manakah pengelolaan yang berjalan lebih baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca agar lebih mengerti secara keseluruhan dari isi skripsi ini, maka sistematika penulisan dan penyajian dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, dimana dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi ruang lingkup pembahasan, lokasi penelitian jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori (landasan teori) yang merupakan dasar bagi penyusunan skripsi ini yang terdiri dari pengertian pajak, jenis pajak, objek dan subjek pajak, fungsi pajak, penggolongan pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, pengertian PBB, mekanisme pemungutan PBB sebelum dan sesudah peralihan serta tinjauan atas penelitian lain yang relevan.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang serta visi, misi, fungsi dan tugas pokoknya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai perbandingan mekanisme pemungutan PBB sebelum dan sesudah peralihan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang serta evaluasinya yang diolah dari data yang diperoleh. Dari data tersebut akan dibandingkan manakah yang jauh lebih baik dan efektif dalam pengelolaan PBB ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini mengungkapkan penarikan kesimpulan berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya dan juga saran-saran yang diberikan penulis dari hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, juga memuat keterbatasan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. 2010. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 61/ PJ/ 2010 tentang tata cara persiapan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 7 Tahun 2012 “Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.”
- Adriani. 2010. *Penagihan Pajak : Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ditjen Pajak 2012, *Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah*, Diakses pada 20 Maret 2013 dari [http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengalihan-pbb-menjadi-pajak -daerah](http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengalihan-pbb-menjadi-pajak-daerah).
- Ditjen Pajak 2012, *Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, Diakses pada 20 Maret 2013 dari <http://www.pajak.go.id/content /seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb>.
- Fitri, Kuniawaty. 2011. Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Tahun II Nomor. 4
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

- Hidayat. S. 2008. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation*. Jurnal Politik, Vol. 1. Universitas Nasional. Jakarta
- Ilyas, Wirawan B. & Richard Burton. 2003. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Resmi, Siti 2009, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat. Jakarta.
- Sari. Yulia, Anggara. 2010. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung*. Jurnal Wacana Kinerja. Vol. XIII, No. 2 November 2010.
- Sahabu, Arifuddin. 2009 *Implementasi Kenijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Studi Kasus tentang Hambatan-hambatan Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang*. WACANA Vol. 12 ISSN. 1411-0199
- Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Edisi Revisi. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Suandy, Erly. 2002, *Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat
- Wahyudi, Eddi. 2012. *Studi Kasus Devolusi PBB P2: Peluang dan Tantangan Bagi Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumbarja*.

<http://eddiwahyudi.com/tag/pajak-bumi-dan-bangunan/>. Diakses 22
Desember 2012.

Wahyudi, Eddi. 2012. Memahami Pengelolaan PBB P2 dan Menyiapkan Peraturan Pendukungnya. <http://eddiwahyudi.com/2012/07/19/memahami-pengelolaan-pbb-p2-dan-menyiapkan-peraturan-pendukungnya/>. Diakses 8 November 2012.

Wahyudi, Eddi. 2012. *SISMIOP: Sang Sistem Pengelola Administrasi*

Waluyo, Wirawan 2004. *Perpajakan Indonesia*. Buku 2, Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo, Wirawan 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

www.ads6.kompasads.com

www.dispenda.palembang.go.id

www.palembang.go.id

www.pajak.go.id